



# MUDIK LEBARAN RESMI DILARANG

■ Sultan Minta Masyarakat Mematuhi



Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri  
BUMN karyawan swasta, maupun  
pekerja mandiri dan juga seluruh  
masyarakat.

**Muhadjir Effendy**  
Menko PMK

**JAKARTA, TRIBUN** - Tradisi mudik pada Lebaran/Idulfitri tahun 2021 ini kembali dilarang oleh pemerintah. Sebelumnya kegiatan serupa juga tidak diperbolehkan pada perayaan Idulfitri tahun lalu.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan sejumlah menteri dan lembaga terkait. "Maka ditetapkan bahwa pada tahun 2021 mudik ditiadakan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3).

Aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja mandiri, "Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri BUMN karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ucap Muhadjir.

Meski begitu, pemerintah tetap memberikan jatah cuti Idulfitri selama sehari. Namun masyarakat dilarang mudik ke kampung halaman.

Muhadjir mengungkapkan, peningkatan angka kasus Covid-19 selalu terjadi tren setelah libur panjang seperti Natal dan tahun baru. "Tingginya angka penularan dan kematian, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat wabah Covid-19 setelah beberapa hari libur panjang," ucap dia.

Selain itu, angka *Bed Occupancy Rate* (BOR) aki-

● ke halaman 7

| Instansi |
|----------|
| 1. ....  |
| 2. ....  |
| 3. ....  |
| 4. ....  |
| 5. ....  |

| Tindak Lanjut                             |
|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi |
| <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui  |
| <input type="checkbox"/> Jumpa Pers       |

## Mudik Lebaran

• Sambungan Hal 1

bat tingginya pasien Covid-19 juga menjadi penyebab ditiadakannya mudik pada tahun ini. "Sehingga diperlukan langkah-langkah tegas dalam mencegah hal tersebut terulang kembali," tutur Muhadjir.

Pemerintah memberlakukan peniadaan mudik mulai dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Muhadjir menegaskan agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar daerah selama tanggal larangan tersebut. Perjalanan luar daerah diperbolehkan untuk kebutuhan yang mendesak.

Terpisah, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mempertanyakan ketaatan masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik. Sebab, berka- ca pada pengalaman libur Lebaran tahun 2020 lalu banyak warga yang meng- abaikan larangan mudik dari pemerintah.

"Ya, tidak apa-apa (dila- rang mudik) tapi apa be- tul nanti mereka taat? Ya, semoga (menaati aturan)," papar Sultan saat dite- muli awak media di Kantor DPRD DIY, Jumat (26/3).

Karena belum mendapat arahan khusus, Pemda DIY belum menentukan skema pembatasan arus keluar masuk kendaraan dan ma- nusia di daerah perbatasan DIY. Pemda juga belum me- ngeluarkan kebijakan khu- sus terkaitantisipasi arus mudik.

Sejauh ini, kebijakan pembatasan yang diterap- kan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 ada- lah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. "Ya kalau sudah dinyatakan tidak bo- leh pergi (mudik), kan asal mereka tidak pergi. Ya, tidak dilakukan apa-apa soalnya di sini (zona) hijau kok," ucap Sultan.

Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, menganggap bahwa langkah yang diam- bil pemerintah merupakan keputusan yang arif. Ter- kait langkah antisipasi ke- datangan pemudik, Pemda DIY akan mengoptimalkan posko-posko Satgas Co- vid-19 yang didirikan sela- ma PPKM mikro.

Selain mengawasi per- gerakan manusia dari luar daerah, posko juga difung- sikan untuk memantau pergerakan manusia antar- kabupaten atau kota. Pem- da DIY juga akan melaku-

kan pengetatan di titik-titik perbatasan untuk menga- ntisipasi kedatangan warga dari luar daerah.

### Dampak

Wakil Wali Kota Yogya- karta, Heroe Poerwadi, me- ngatakan pihaknya siap mendukung segala kepu- tusan yang dikeluarkan pemerintah pusat, terkait upaya pengendalian Co- vid-19. Hanya saja, ia ti- dak menampik, pelarangan mudik berdampak pada ke- langsung perekonomian masyarakat.

"Kalau akhirnya dilarang, yang jelas terpukul adalah te- man-teman PHRI, hotel, res- toran. Mereka kemarin sudah berusaha membangun opti- mismisme, tapi kalau (mudik) di- larang, mereka akan merasa- kan dampak lagi," ucapnya, Jumat (26/3).

Walau begitu, Heroe da- pat memahami, peratur- an tersebut, merupakan langkah pemerintah pusat dalam menghadapi bulan- bulan krusial. Bagaimana tidak, antara Idulfitri yang identik dengan mudik, ke- mudian pembelajaran tatap muka yang rencana dimu- lai per Juli, bergulir secara berdekatan.

"Karena pelaksanaan (se- kolah) tatap muka, kemudi- an mudik juga, yang akan

memperbanyak aktivitas pariwisata. Kalau itu se- mua jalan, terjadi interaksi yang intensif," terangnya. "Makanya, memang harus diatur pola interaksi yang terjadi. Baik pembelajaran tatap muka, mudik, dan pariwisata. Agar tidak me- numpuk berbarengan begi- tu," imbuh Heroe.

Seandainya pemerintah melakukan pembiaran tanpa menerapkan batas- batas tertentu, maka yang terjadi adalah lonjakan kembali kasus Covid-19. Pasalnya, ia tak memung- kiri, sejauh ini masih ba- nyak masyarakat, yang belum disiplin dalam me- laksanakan protokol kese- hatan. "Ya, kalau ternyata masyarakat belum disiplin menjalankan proses, se- hingga berpotensi menim- bulkan ledakan kasus Co- vid-19, karena waktunya kan bersamaan," katanya.

Namun, Ketua Harian Satgas Penanganan Co- vid-19 Kota Yogyakarta tersebut masih menunggu aturan lengkap dari peme- rintah pusat terkait pela- rangannya mudik Idulfitri un- tuk semua kalangan ini. Jika memang diterapkan pembatasan, Pemkot siap mengondisikan dengan se- baik mungkin. (tro/aka)

| Instansi                                              | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan                                    | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man |              |       |                 |

Yogyakarta, 06 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005